

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
TINDAK PIDANA REMAJA GENG MOTOR DI KOTA
MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
POLRESTABES MAKASSAR)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :
IMAM FADLY ALIF UTAMA
NIM. 10300110010

**HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Fadly Alif Utama
NIM : 10300110010
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang / 24 Maret 1991
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : BTN Bulurokeng Permai F1 No. 3
Judul : Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 24 Maret 2016

Penyusun,



IMAM FADLY ALIF UTAMA

NIM: 10300110010

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulis skripsi Saudara Imam Fadly Alif Utama, Nim: 10300110010 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Tindakan Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus Polrestabes Makassar*)," memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata-Gowa, 2 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj Rahmatiah, HL, M.Pd
NIP.19690606 199403 2003


Dr. Kurniati, S.Ag, M.Hi
NIP.199740627200604 2002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar (Studi kasus Polrestabes Makassar),” yang disusun oleh saudara Imam Fadly Alif Utama, NIM: 10300110010, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 28 Maret 2016 M, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1437 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dalam Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 28 Maret 2016 M.
15 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqis I	: Prof. Dr. Usman M.Ag	(.....)
Munaqis II	: Dr. Hamsir, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj Rahmatiah, HL, M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, S.Ag, M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Maka sepantasnyalah persembahkan puji syukur hanya di peruntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polretabes Makassar).

Kemudian selalu kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup. Yang telah mengantarkan kita semua dari dunia perhimpunan, dunia perikatan menuju ke dunia pergerakan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Ayahanda Muhammad Anwar dan Ibunda Hj. Zamzan, semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-

Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu peroleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan.

2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
4. Dr. Hj Rahmatiah, HL, M.Pd dan Dr. Kurniati, S.Ag, M.Hi selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si selaku ketua jurusan serta Ibu Dr. Kurniati, S.Ag, M.Hi selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
6. Bapak Polrestabes Makassar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yudisial tersebut.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
8. Saudara-saudaraku yang tercinta: Iftitah Faradillah Annisa, Istiqomah Maulidina Annisa, dan Islah Cinta Maritza yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis. serta Kakanda senior di jurusan

Hukum Pidana dan ketatanegaraan yang selalu memberikan waktu untuk memberikan waktu dan ilmunya,

9. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di HPK angkatan 2010 serta kepada teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu mereka semua telah menjadi inspiratif kepada penulis secara tidak langsung.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.,,Amien

Samata-Gowa, 24 Maret 2016

Penyusun,

IMAM FADLY ALIF UTAMA

NIM: 10300110010

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Pengertian Kejahatan Geng Motor.....	14
B. Faktor-faktor Terbentuknya Kejahatan Geng Motor	20
C. Upaya dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor	27
 BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	36

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil Lokasi Polrestabes Makassar	38
B. Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Geng Motor	40
C. Upaya Polrestabes dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor di Kota Makassar.....	45
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaku Kejahatan Geng Motor di Makassar	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>kasrah</i>	I	i
ُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dani
اُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif' atau yaa'	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَّضَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

وَبِاللهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillaah*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt = *subhanallahu wata'ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wasallam*

a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Imam Fadly Alif Utama
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
NIM : 10300110010
Judul Skripsi : **Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus Polrestabes Makassar*)**

Skripsi ini membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap kejahatan tindak pidana remaja geng motor di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam (studi kasus Polrestabes Makassar) dengan sub permasalahan yaitu : 1) Bagaimana tinjaun kriminologis kejahatan geng motor ?, 2) Bagaimana upaya Polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan geng motor di kota Makassar ? dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan geng motor ?.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah *field research kualitatif* dan penelitian pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar, antara lain : faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, pengaruh minuman keras, dan faktor pendidikan. Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat.

Istilah geng motor belum ditemukan dalam istilah hukum Islam, dikarenakan pada masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat-sahabatnya belum ada kendaraan sejenis motor. Namun, karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah Qiyas atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama dan dikenakan hukuman ta'zir.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perkembangan kasus geng motor di kota Makassar sangatlah menakutkan dan membuat resah warga kota Makassar. 2) Perkembangan geng motor ini bagaikan jamur dimusim hujan yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. 3) Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga menjadi terusik dan kehadiran geng motor ini juga telah mencuri perhatian masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sebagaimana yang sering di beritakan akhir-akhir ini tentang kejahatan genk motor semakin marak terjadi khususnya di kota Makassar, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan maupun perampokan yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja genk motor. Hal ini dapat kita ketahui melalui berbagai media massa yang antara lain televisi, radio, surat kabar serta media cetak lainnya dan bahkan dari internet yang memberikan informasi mengenai masalah kejahatan geng motor tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi khususnya Kota Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.¹ Berbagai fasilitas mewah yang ada dimana-mana sehingga kota Makassar dijuluki Makassar menuju kota dunia. Disisi lain, gemerlap kota Makassar sangat mempengaruhi terbentuknya geng motor sebagai wadah berkumpul.

Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*juvenile delinquency*” dirumuskan sebagai tingkah laku, perbuatan atau pun tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar anti-anti sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

¹<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANISLAM2/glby1350999690.pdf>. (Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2014).

Remaja dimaksudkan disini, mereka dalam usia 12 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka dinamakan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (remaja) dinamakan “Delinquency”.²

Fenomena sosial terjadi dikalangan anak muda atas tindakan anarkis geng motor. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaliknya mereka merasa bangga jika masyarakat takut. Adanya rasa bangga bagi anggota geng motor yang mampu merobohkan lawan, merusak harta benda orang lain, merampok, merusak fasilitas umum, merupakan musibah bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, ingin mengemukakan tentang wujud perilaku *delinkuen* yang erat kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor. Wujud perilaku ini yaitu:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman *milieu* sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;

²<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANISLAM2/glby1350999690.pdf>. (Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2014).

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan;
7. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, *drugs*) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.³

Dalam menguraikan latar belakang penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi mengemukakan bahwa, kejahatan adalah hasil dari beberapa faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal diri pelaku kejahatan. Maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan,

³Lihat pada situs. <http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html>. (Diakses pada tanggal 10 November 2015)

dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh geng motor khususnya yang terjadi di kota Makassar.

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal,

ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.⁴

Masyarakat sudah jenuh, bahkan muak dengan perilaku destruktif yang dipertontonkan anggota geng motor. Sudah banyak korban atas aksi kawan-geng motor yang mengakibatkan rasa takut dikalangan masyarakat. Ketakutan atas geng motor sudah menghantui masyarakat, tak ada lagi kedamaian di keheningan malam, karena selalu pecah oleh raungan motor dan suara ribut tawuran.

Tak pernah berani keluar malam hari karena di lingkungan sekitar yang marak aktifitas geng motor. Geng motor yang sudah terlanjur berbuat anarkis menjadi tidak takut untuk mengulangnya lagi. Lama kelamaan gerombolan geng motor ini akan tumbuh menjadi sebuah kelompok besar. Kelompok yang akan menjalani atau mengisi kehidupannya berdasarkan peraturannya sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang dibuat pemerintah. Karena mereka ada bukan sebagai pendukung pemerintahan. Kelompok ini perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma masyarakatnya.⁵

Dampak yang kian meluas akibat dari tindakan geng motor ini telah mulai mengusik kenyamanan masyarakat dimana kepercayaan terhadap pihak keamanan yang berwenang mulai diragukan dengan kenyataan belum mampu mengatasi geng motor.

⁴Lihat pada situs <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/>. (Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2015).

⁵Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999), h. 413-414.

Geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan gejala watak kebingasan anak muda. Perkembangannya, tak lepas dari trend dan mode yang sedang berlangsung saat itu. Maka dari itu aksi brutal itu perlu diredam. Mulanya berbuat jahat dari yang ringan seperti bolos sekolah, lama-lama mencuri, merampok dan membunuh. Lumrahnya jika sudah berani jahat ada indikasi mereka mengkonsumsi narkoba.

Tindakan yang dilakukan geng motor belakangan ini kian meresahkan warga karena sudah mengarah ke perbuatan kriminologi. Geng motor kini memang menjadi salah satu perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani. Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga mengambil korban masyarakat biasa. Tak salah jika masyarakat menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar perampasan barang berharga milik korban, seperti uang, HP, tas, hingga motor. Dalam aksinya, mereka tak segan-segan menganiaya korban bahkan sampai membunuh korbannya.

Jika geng motor tersebut tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut bisa kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Indikasi itu mulai muncul dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor akhir-akhir ini. Kalau geng motor brutal itu tidak segera dibubarkan maka akan sangat membahayakan karena terdapat solidaritas sempit yang telah didoktrinkan kepada setiap anggota geng motor tersebut, sehingga mengarah pada tindakan kriminal.

Mulanya kumpul-kumpul sesama pecinta motor, kemudian berubah jadi geng yang beranggotakan puluhan bahkan ratusan orang. Di jalanan, mereka membentuk gaya hidup yang terkadang menyimpang dari kelaziman demi menancapkan identitas kelompok. Ngetrack, kebut-kebutan, dan tawuran adalah upaya dalam pencarian identitas mereka.

Selama ini banyak anggota geng motor itu dari kalangan anak-anak Sekolah Mengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan menggunakan berbagai jenis motor. Mereka berkeliaran di malam hari sekitar pukul 23.00 sampai 03.00, dan melakukan berbagai keonaran, penganiayaan dan kejahatan lainnya, bahkan sampai membunuh. Geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan gejala watak kebingasan anak muda.

Menurut Walter Lunden, faktor – faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota- kota jumlahnya cukup besar dan sulit dicegah.
2. Terjadi konflik antar norma adat pedesaan tradisonal dengan norma – norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama kota – kota besar.
3. Memudarnya pola – pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol tradisonalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” untuk melakukan perilakunya.⁶

⁶Ninik Widiyanti – Panji Anaroga, *perkembangan kejahatan dan masalahnya di tinjau dari segi kriminologi dan sosial*, Pradnya Paramita, (Jakarta , 1987), h. 2

Adapun pasal-pasal yang termuat dalam KUHP yang dapat diberikan terhadap kejahatan geng motor yaitu:

Dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁷

Kemudian dalam Pasal 351 yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸

Ditambahkan lagi dalam Pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

⁷R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), h. 146-147.

⁸R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 244-245..

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁹

Adapun orang-orang yang mengganggu keamanan, mengacau kententraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan, dan syariat, merusak kepentingan umum mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan. Hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan, hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta.¹⁰

Bagi remaja-remaja yang ternyata salah memilih tempat atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang akan terjadi di kemudian hari adalah berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi apabila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat maka sudah tentu berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor khususnya di Kota Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Yaitu yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 170, 351, dan 362. Adapaun cara sistem peradilanya apabila yang melakukannya anak atau remaja yang masih di bawah umur 18 tahun maka proses pengadilannya menggunakan acuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

⁹R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 249.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010), h. 389.

Memperhatikan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi inilah :“Bagaimana Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”?

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap kejahatan geng motor ?
2. Bagaimana upaya Polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan geng motor di kota Makassar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan geng motor ?

C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

Untuk lebih terarah mencegah timbulnya pemahaman dan penafsiran yang keliru, maka dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan definisi operasional tentang kata-kata yang dianggap penting, yaitu :

“Kriminologis” merupakan ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya; ilmu tentang kejahatan. Lembaga-lembaga yang mempelajari kejahatan sebagai gejala

masyarakat.¹¹ Menurut penulis kriminologis adalah Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat

“Kejahatan” berasal dari kata *crime (Ing, Pr): midriff (Bld)*: tindak pidana yang tergolong berat.¹² Menurut penulis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

“Tindak Pidana” Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

“Remaja” Artinya adalah berangsur-angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan dan social serta emosional.¹⁴

“Geng” merupakan sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya.¹⁵

Menurut penulis geng motor merupakan sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

¹¹ Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 242.

¹² Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, h. 242.

¹³ Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, h. 54

¹⁴ Al-Mighwar Muhammad, *Psikologi Remaja*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 55

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001)

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian penulis , ada beberapa kajian yang terkait dengan penelitian tertulis :

Adam Kuper dan Jessica Kuper dalam bukunya *Eksiklopedi Ilmu-ilmu Social*, Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “*play group*”(kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda.

Menurut penulis dalam melihat buku tersebut sudah memberikan informasi secara detail tentang sejarah munculnya istilah geng motor namun sangat terbatas dalam membahas hal bentuk tujuan dari perbuatan geng motor.

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*. Dalam buku ini menjelaskan geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki-laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak mudah ini kemudian menjadi jahat.

Menurut penulis dalam melihat buku tersebut yaitu keterbatasan buku ini tidak menjelaskan batasan umur yang di kategorikan anak-anak maupun remaja dan buku ini tidak spesifik memberikan bentuk daripada kejahatan yang dimaksud.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dari penulis ini adalah :
 - a. Untuk memahami tinjauan kriminologis kejahatan geng motor;
 - b. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan geng motor di kota Makassar
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan geng motor.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kejahatan Geng Motor

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.¹ Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. *Kedua*, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

¹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru 2010). h. 16.

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.²

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).

²Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru 2010). h. 16-17.

3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti kelompok remaja yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan gerombolan⁴. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak.⁵

Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar

³Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru 2010). h. 18.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 464.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 973.

dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.⁶ Adapaun Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa:⁷

Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu:

Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh.

⁶<http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. Diakses tgl.15 September 2015, Pukul 22:40 WITA

⁷Yamil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). h. 391.

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan klub motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.⁸

Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.⁹ Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya.¹⁰ Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapakemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 14.

⁹Mulyana Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1981). h. 97.

¹⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, h. 14.

menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.¹¹

Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaan sosialnya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.¹² Adapun pasal-pasal yang termuat dalam KUHP yang dapat diberikan terhadap kejahatan geng motor yaitu:

Dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, h.15.

¹² Rob White, *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia* (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2008). h. 40.

- b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.¹³

Kemudian dalam Pasal 351 yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁴

Ditambahkan lagi dalam Pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁵

B. Faktor Penyebab Terbentuknya Kejahatan Geng Motor

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18.¹⁶ Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa

¹³R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), h. 146-147.

¹⁴R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 244-245..

¹⁵R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 249.

¹⁶A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 43.

dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang.

¹⁷Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.¹⁸ Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab

¹⁷A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 43.

¹⁸A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 44.

musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori. Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum,¹⁹ yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa

¹⁹A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 44.

seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan,²⁰ adalah sebagai berikut :

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.²¹

Adapun teori-teori yang menjadi penyebabnya timbulnya suatu kejahatan, penjelasannya sebagai berikut :

1. Teori Anomie

Menurut ahli sosiologi asal Prancis Emile Durkheim, menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan

²⁰A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 45.

²¹A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 46.

moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan.

Dikatakan oleh Durkhheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”.²² Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan

²²A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 47.

harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi *anomie*.²³

2. *Cultural Deviance Theories* (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain:

a. Social Disorganization Theory

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky, mengaitkan hal ini dengan *social disorganization*, yaitu: *The breakdown of effective social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).²⁴ Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁵

²³A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 48

²⁴A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 54.

²⁵A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 55 .

b. Differential Association

E.H Sutherland, mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan.

Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari)
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- 3) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).²⁶
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui

²⁶A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 57.

definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).²⁷

3. Teori Kontrol Sosial (*Control Sosial Theory*)

Teori kontrol atau *theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.²⁸

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr. Reiss, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari *control social* dalam menjelaskan kenakalan remaja, antara lain:²⁹

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
- b. Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak;
- c. Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.³⁰

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Geng Motor

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya.

²⁷A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 58

²⁸A. S. Alam dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 62.

²⁹A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 62.

³⁰A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 63.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³¹

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan

³¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, h. 79

masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.³² Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni.³³

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

³² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 1987), h. 137.

³³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 1987), h. 139.

- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

b. Penghukuman (*punishment*).

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.³⁴

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan

³⁴A. S. Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, h. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk rasional sebenarnya sudah dibekali rasa hasrat ingin tahu. Keinginaan manusia ini sudah dapat disaksikan sejak seseorang masih kanak-kanak dan akan terus berkembang secara dinamis mengikuti fase-fase perkembangan kejiwaan orang tersebut. Hasrat ingin tahu manusia akan terpuaskan bila telah memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dipertanyakan.

Tetapi sudah menjadi sifat manusia, yang mana setelah memperoleh pengetahuan mengenai suatu masalah, maka akan disusul oleh kecenderungan ingin lebih tahu lagi. Untuk mnedukunng dan menyalurkan keingintahuannya, maka manusia akan cenderung mengadakan penelitian.¹

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan bentuk apapun metode penelitian.²

¹Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. 12; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 4.

²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksud sebagai suatu metode untuk memperoleh data dengan jalan penelitian langsung ke Polrestaes Makassar guna memperoleh data seberapa banyak kasus yang terjadi tentang kasus geng motor itu sendiri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan masalah-masalah yang dibahas dengan pendekatan hukum, baik dengan Undang-undang Dasar 1945 dan KUHP ataupun peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i), pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum untuk lebih memahami sudut pandang kriminologis terhadap kejahatan geng motor dalam perspektif hukum Islam,

2. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai melihat tinjauan kriminologis kejahatan geng motor di kota Makassar.

C. Sumber Data/Populasi dan Sample

Populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif serupa. Dalam hal lain pula mendefinisikan populasi sebagai suatu kelompok besar dari kesatuan sampel yang hendak diteliti. Populasi yang akan diteliti oleh penulis yaitu anggota kepolisian Polrestabes Makassar.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan bagian yang representatif dan mereperesentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi.³ Maka demi alasan praktis, pihak peneliti akan meneliti sebagian tertentu saja dari beberapa elemen-elemen populasi yang dianggap sebagai sampel dan anggota sampel dalam penelitian tersebut. Itu dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh informan untuk memperoleh data yang ingin didapatkan.

Dengan demikian yang menjadi sampel oleh peneliti yaitu, anggota satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Dalam menentukan informan dalam pembagian yang dicantumkan di atas, maka yang digunakan adalah dengan sampel purposive yaitu, teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat

³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. 3; Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 103-104.

tertentu yang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri dan sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴ Dalam pengertian lain juga menjelaskan teknik digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁵

Dengan demikian untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh penulis, maka dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer yaitu, melalui survei dan observasi,
2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu,⁶

Dan untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut:

⁴Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. h. 116

⁵Husaini Usamn dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Ed. 1, Cet. 4; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 45

⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi* (Edi. 1, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 138.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945,
 - 2) Undang-undang, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil peneillitian, dan sebagainya,
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu,
2. Observasi, yaitu salah satu metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian,

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986), h. 52.

3. Dokumen, yaitu sejumlah besar dan fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, laporan, foto, dan lain-lain.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas;
- b. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Profil Polrestabes Makassar*

Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya.¹ Yang juga merupakan pintu kawasan Indonesia timur (KTI), posisi yang sangat strategis ini membuat kota Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi selatan dan Indonesia timur.

Dinamika masyarakat Sulawesi selatan khususnya kota Makassar tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung terjadinya perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dinamika tersebut selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan seperti kejahatan konvensional, dimensi baru, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Secara geografis kota metropolis Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 19°18'27,97" 119°32'31,03" bujur timur dan 5°00'30,18" -5°14'6,49" lintang selatan dengan luas wilayah 175.77 km².²

¹Polrestabes Makassar, *Profil Polrestabes Makassar*, (Makassar, Polrestabes Makassar, 2014), h. 2.

²Polrestabes Makassar, *Profil Polrestabes Makassar*, h. 2.

Adapun wilayah hukum polrestabes Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas utara : kabupaten Pankajene kepulauan
2. Batas selatan : kabupaten Gowa
3. Batas timur : kabupaten Marosbatas
4. Batas barat : selat Makassar³

Secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan namun untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 Polsek dari 14 kecamatan dan 142 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan ketinggian kota Makassar bervariasi 20⁰ C sampai dengan 32⁰ C. Kota Makassar diapit dua buah yaitu : sungai Tallo yang bermuara sebelah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara bagian selatan kota.

Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan kultur yang berbeda-beda timbulkan problema dan pemicu timbulnya gejala sosial.⁴ Disamping itu, adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang membias pada reaksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada stabilitas ketertiban masyarakat.

Polri sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi peace, demokrasi, dan

³Polrestabes Makassar, *Profil Polrestabes Makassar*, h. 3.

⁴Polrestabes Makassar, *Profil Polrestabes Makassar*, h. 2.

property dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, adil, demokrasi dan sejahtera.⁵

B. Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Geng Motor

Dalam menguraikan latar belakang penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi mengemukakan bahwa, kejahatan adalah hasil dari beberapa faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal diri pelaku kejahatan.⁶ Maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh geng motor khususnya yang terjadi di kota Makassar.

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka

⁵Polrestabes Makassar, *Profil Polrestabes Makassar*, h. 4..

⁶Lihat pada situs <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/>. (Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2015).

dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri.

Sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.⁷

Berkaitan dengan kejahatan geng motor di kota makassar maka dengan ini penulis menyampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Polres Makassar, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Untuk lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

⁷Lihat pada situs <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/>. (Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2015).

Tabel I
Jenis kejahatan geng motor di kota Makassar pada tahun 2011-2014

No.	Jenis Kejahatan	Tahun				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1	Pembunuhan	23	18	2	23	66
2	Penganiayaan Berat	473	423	48	213	1157
3	Curanmor	869	1288	2	1440	3599
4	Curi Keras	280	215	8	285	788
5	Pengroyokan	157	141	26	237	561
6	Curi Berat	579	426	18	206	1229
Jumlah		2381	2511	104	2404	7400

Sumber : Data Kantor Polrestabes Kota Makassar, tahun 2011-2014.⁸

Dalam Tabel tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, terdapat total 7400 kasus, yang di tiap jenis kejahatannya terjadi peningkatan dan penurunan, yakni pada kasus pembunuhan, penganiayaan berat, curanmor, curi keras, pengroyokan, dan curi berat.

Dengan demikian jenis kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar 2011 -2014 telah mengalami peningkatan dari jumlah kasus dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena wilayah kota Makassar yang sangat cukup luas dan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku geng motor dalam melakukan kejahatan. Korbannya tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa sekalipun.

⁸Brigpol Riswandi, Anggota Reserse Kriminal Makassar, *Wawancara*, tanggal 19 Oktober 2015.

Dalam hasil wawancara anggota satuan reserse kriminal Polrestabes Makassar Brigpol Riswandi menerangkan “Sebenarnya, kasus mengenai geng motor ini, jumlahnya bisa lebih dari data yang ada. Selain itu banyak yang pelakunya melarikan diri, tidak cukup bukti dan tidak adanya saksi. Jika melihat terdapat kejahatan geng motor di sekeliling kita maka secepatnya menghubungi kepolisian untuk mengamankan kekacauan yang ditimbulkan oleh geng motor. Apabila pelaku geng motor tersebut disarankan agar bertindak main hakim sendiri, serahkan kepada kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.”⁹

Dalam wawancara Brigpol Riswandi selaku Reserse Kriminal Kepolisian Resor Makassar, menguraikan kepada Penulis, bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, antara lain :

1. Faktor keluarga;
2. Faktor lingkungan;
3. Faktor ekonomi;
4. Pengaruh minuman keras;
5. Faktor pendidikan.¹⁰

Tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor khususnya di kota Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana

⁹Brigpol Riswandi, Anggota Reserse Kriminal Makassar, *Wawancara*, tanggal 19 Oktober 2015.

¹⁰Brigpol Riswandi, Anggota Reserse Kriminal Makassar, *Wawancara*, tanggal 19 Oktober 2015.

yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 yang berbunyi :

1. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Penjelasan dalam Pasal ini ialah “melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Kekerasan yang dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹¹

Kemudian dalam Pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹²

Ditambahkan juga pada Pasal 362 tentang pencurian yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

¹¹R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 146-147.

¹²R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 244-245.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹³

C. Upaya Polrestabes Makassar dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor di Kota Makassar

Keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”¹⁴.

Keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.¹⁵

Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua institusi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara.¹⁶

¹³R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 249.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 55.

¹⁵Romi Librayanto. *Ilmu Negara* (Makassar : Refleksi, 2009), h. 123.

¹⁶Lihat pada Puspen Tentara Nasional Indonesia. 2012. *Perbedaan mendasar fungsi Tni dan Polri*. <http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2015).

Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.¹⁷

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.¹⁸

Fenomena Kejahatan geng motor telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

¹⁷Lihat pada Undang-undang Dasar Tahun 1945.

¹⁸Lihat pada situs Indonesia Polive Watch. 2013. *Anarkisme Geng Motor Kembali Berlanjut*. <http://indonesia-policewatch.com/>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2015).

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Resor (Polrestabes) Makassar dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya yang terjadi di kota Makassar dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam wawancara pada tanggal 20 Oktober 2015 Pukul 10.00 WITA, Brigpol Riswandi selaku anggota Kepolisian Resor Makassar menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Makassar, antara lain:

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
- c. Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras;

- d. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;
- e. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.¹⁹

2. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi terpidana;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.

¹⁹Brigpol Riswandi, Anggota Reserse Kriminal Makassar, *Wawancara*, Tanggal 19 Oktober 2015.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota Polres Makassar dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan;
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Dari dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup normal kembali seperti biasanya.

Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang telah diperbuat di dunia dan kelak di

akhirat, akan mendapatkan balasan juga. Jadi, pembinaan ini membuka kesadaran berpikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianutnya, agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat kelak.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan Geng Motor

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan Hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Jarimah (kejahatan) dalam Hukum Pidana Islam (Jinayat) meliputi, jarimah hudud, qishash diyat dan ta'zir.

Istilah geng motor belum ditemukan dalam istilah hukum pidana Islam, dikarenakan pada masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat-sahabatnya belum ada kendaraan sejenis motor. Namun, karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah Qisas atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama.

Kasus geng motor bila pemberian sanksinya dapat dikenakan hukuman ta'zir juga. Alasannya karena ada tiga tipe kejahatan anak geng motor, pertama, geng pencurian (*thief gangs*), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok. Kedua, geng

konflik (*conflict-gangs*) kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani.

Ketiga, geng pengasingan (*retreats gangs*), kelompok geng ini sengaja mengasingkan dirinya dengan kegiatan minum-minuman keras, atau napza yang kerap dianggap sebagai suatu cara "pelarian" dari alam nyata. Tetapi bisa saja sebuah geng memiliki lebih dari satu macam tipe.

Jarimah Ta'zir merupakan jarimah yang paling ringan diantara jarimah lain nya, dan sifat dari jarimah ta'zir itu sendiri hanya memberi jera kepada si pelaku kejahatan namun pemberian jera tersebut tidak mencapai kepada hukuman mati. Jarimah ta'zir ini tidak ada ketentuan nya dari Al-Qur'an dah Hadits Nabi sehingga ada sebagian para yang menjadikan hal ini sebagai definisi dari jarimah ta'zir.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran

kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁰

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Dan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: *"Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'"*.

Secara ringkas dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.

Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

²⁰H. A Djazuli, *Fiqh Jinayat; Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). h. 89.

Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah swt atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.²¹

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah atau pembunuhan ayah terhadap anaknya.
2. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya

²¹Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003). h. 78.

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.²²

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Adapun dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengatur tentang kejahatan yang mengakibatkan orang menderita yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 33, Allah swt berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”²³

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengganggu keamanan, mengacau kententraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan, dan syariat, merusak kepentingan umum mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

²²Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). h. 121.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010), h. 389.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengganggu keamanan, mengacau kentraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan, dan syariat, merusak kepentingan umum mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan. Menurut jumhur ulama, hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan, hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta. Sedangkan hukuman terhadap pengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukuman pembuangan itu berarti hukuman penjara atau boleh diganti dengan penjara.²⁴ Dalam hadits yang berkaitan tentang perampokan dan pencurian dari Aisyah r.a, Nabi Muhammad saw bersabda yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya :

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘tangan dipotong karena pencurian yang nilainya serempat dinar dan selebihnya’²⁵

Allah swt melindungi darah, kehormatan, dan harta manusia dengan segala cara yang menjamin kejahatan para perusak dan sebagai cara untuk melindungi

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 390.

²⁵Hadits 351 Buhkari Muslim, lihat lebih jelasnya Abdullah bin Abdurrahman bin Shahih Ali Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Cet. VII; Jeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992), diterjemahkan Kathur Suhardi dalam Buku *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h. 892.

harta dan kehidupan, agar tercipta rasa aman, jiwa menjadi tenang, manusia bias mengembangkan harta bendanya lewat dengan bekerja dan mencari keuntungan.

Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman ta'zir antara lain:

1. Hukuman Mati

Mengenai ada nya hukuman mati pada macam-macam jarimah ta'zir merupakan khilaf para ulama, ada yang setuju dengan ada nya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan.

Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: *"Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud"*.

3. Hukuman Penjara Kurungan

Ada dua macam hukuman penjara kurungan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman

penjara kurungan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Kedua, Hukuman penjara kurungan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman penjara kurungan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman had. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si pelaku kejahatan disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan

dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

6. Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah saw pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama limapuluh hari tanpa diajak bicara.

7. Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.²⁶

²⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). h. 147.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan geng motor adalah :
 - a. Faktor keluarga;
 - b. Faktor lingkungan;
 - c. Faktor ekonomi;
 - d. Pengaruh minuman keras;
 - e. Faktor pendidikan.
2. Upaya Kepolisian Resor (Polrestabes) Makassar dalam penanggulangan kejahatan geng motor di kota Makassar adalah dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan geng motor adalah karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah Qisas atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama. Kasus geng motor bila pemberian sanksinya dapat dikenakan hukuman ta'zir juga.

B. *Implikasi Penelitian*

Perkembangan kasus geng motor di kota Makassar sangatlah menakutkan dan membuat resah warga kota Makassar. Perkembangan geng motor ini bagaikan jamur dimusim hujan yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga menjadi terusik dan kehadiran geng motor ini juga telah mencuri perhatian masyarakat.

Tindakan Geng Motor yang kian berani yang bukan hanya melakukan perkelahian sesama geng motor tetapi juga melakukan perkelahian dengan warga. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan sampai pihak Pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor.

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmiah bagi para civitas akademi UIN Alauddin Makassar yang ingin fokus mengkaji kejahatan Geng Motor khususnya di kota Makassar dan kemudian mengkaji kejahatan geng motor dalam perspektif hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syani. *Sosiologi Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 1987.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Eksiklopedi Ilmu-Ilmu Social*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Alam, A. S. Dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Al-Mighwar, Muhammad. *Psikologi Remaja*. Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Anwar Adang, Yasmin. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Barda Nawawi, Alif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1983.
- Chainur, Arasjid. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Donald Ary. Dkk *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan: Terjemahan oleh Arief Furchan*. Cet. III; Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Gunawan, Ary. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hanafi, Ahmad Hasan. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayat; Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Jonathan Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010.
- Kusumah, Mulyana. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981
- Librayanto, Romi. *Ilmu Negara*. Makassar : Refleksi, 2009.
- Lopa Baharuddin dan Yamin Moch. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung, 2001.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES, 1985.
- Sartono, Suwarniyati. *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Laporan Penelitian UI. Jakarta: Persada, 1985.
- Santoso, Topo dan Achjani, Eva. *Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Simanjuntak, B. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni, 1997.
- Putra, Sandro. *Beringasnya Geng Motor Wujud dari Kenakalan Remaja Indonesia*. <http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. (Diakses Pada Tanggal 15 September 2015).
- Sukanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999.
- Razak, Yusron. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Jakarta: LSA, 2008.
- Republik Indonesia. *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap*. Cet. VI,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I: Jln. Slt. Alauddin No. 03 Makassar. Tlp (0411) 864928-864923
Kampus II: Jln. Slt. Alauddin No. 36 Romangpolong-Gowa. Tlp (0411) 424835 Fax 424836

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISWANIRI / BRUBPOL
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Jl. Jend. A. YANI NO.9 MKS


Menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Imam Fadly Alif Utama
Nim : 10300110010
Semester : XI/11
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

adalah benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polrestabes Makassar)". Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 19 Oktober 2015

Responden


(RISWANIRI / BRUBPOL Map 8680059)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 08 Oktober 2015

Nomor : 13741 /P2T-BKPMMD/19.36P/VII/10/2015
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kapolrestabes Makassar

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor :
SI.1/PP.00.9/1173/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Imam Fadly Alif Utama
Nomor Pokok : 10300110010
Program Studi : Hukum Pidana & Ketatanegaraan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 03, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi,
dengan judul :

**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA GENG MOTOR DI KOTA
MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Oktober s/d 08 November 2015

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pertinggal



website : www.p2tprovusulsel.com, email : p2t_provusulsel@yahoo.com

